**PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Indonesia sebagai daerah tropis mempunyai keanekaragaman hayati tinggi, baik di darat maupun di laut khususnya di wilayah pesisir. Tingginya keanekaragaman hayati tersebut tidak lepas dari kondisi geofisik dan letak geografis perairan Indonesia **(Bengen 2002)**. Salah satu unsur keanekaragaman hayati wilayah pesisir dan laut adalah ekosistem hutan mangrove.

Data terbaru yang diperoleh dari Indonesia Maritime Institute pada tahun 2012 terdapat sebesar 48 persen atau 4,51 juta hektar hutan mangrove Indonesia masuk dalam kategori rusak sedang dan 23 persen atau 2,15 juta hektar dalam kategori rusak berat. Hal yang menjadi penyebab utama kerusakan hutan mangrove di Indonesia adalah akibat ulah manusia dalam bentuk kegiatan perluasan tambak dan penebangan kayu mangrove yang tidak terkontrol **(Indonesia Maritime Institute, 2012)**.

Kabupaten Nias Utara merupakan salah satu wilayah administrasi di Provinsi Sumatera Utara yang terletak di pesisir barat pulau Sumatera dan berbatasan langsung dengan Samudera Hindia. Secara astronomis, terletak antaran 1003’00’’-1033’00’’Lintang Utara dan antara 97000’00’’-99000’00’’ Bujur Timur. Kabupaten Nias Utara diapit oleh Perairan di sebelah utara dan barat, Kota Gunung Sitoli dan Hindia di sebelah timur dan Kabupaten Nias dan Nias Barat di sebelah selatan. Luas wilayah Kabupaten Nias Utara adalah 1.501,63 km2 yang terdiri dari 11 kecamatan dan 113 Desa/Kelurahan (112 desa dan 1 kelurahan) **(BPS Kabupaten Nias Utara, 2016)**.

Kecamatan Sawo dengan luas wilayah: 90,49 km2 dan jaraknya dari ibu Kota Kabupaten 22 km, yang terditi dari 10 desa, antara lain: Hiliduruwa, Lasara sawo, Ombolata Sawo, Onozitoli Sawo, Sanawuyu, Sawo, Seriwau, Sifahandro, Sisarahili Teluksiabang, Teluk Bengkuang adalah merupakan kecamatan yang berpotensi **( BPS Kabupaten Nias Utara, 2016)**.

Untuk mempertahankan kelangsungan hidup bagi hutan mangrove di Kabupaten Nias Utara maka penjagaan dan pemeliharaan hutanlah yang menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan. Dalam hal ini yang berperan untuk penjagaan dan pemeliharaan tersebut bukan hanya dari pihak pemerintah saja, namun dari berbagai pihak yang terkait akan keberadaan hutan tersebut, antara lain: Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, Lingkungan Hidup dan Dinas Kelautan Kabupaten Nias Utara secara hukum berperan dalam mengelola dan menjaga keberadaan hutan mangrove. Namun tanpa adanya kerjasama yang baik dengan masyarakat sekitar, maka tidak tertutup kemungkinan akan menimbulkan terjadinya pengrusakkan hutan mangrove.

Populasi hutan mangrove di Kabupaten Nias Utara Propinsi Sumatera Utara ini semakin lama semakin berkurang. Hal ini disebabkan karena tingkat pertumbuhan dan aktifitas masyarakat yang semakin pesat dan semakin meningkat menyebabkan tingkat konversi lahan pembangunan, baik lahan pemukiman maupun lahan pertanian atau perkebunan masyarakat sehingga menyebabkan penyempitan ruang bagi tumbuhan mangrove untuk tumbuh dan berkembang dengan baik.

Sebagian besar manggrove di Kawasan Pesisir Desa Sarahili Teluk Siabang Kecamatan Sawo masih dalam keadaan baik namun sebagian juga sudah dalam kondisi memprihatinkan atau rusak, kerusakan ini disebabkan oleh gempa bumi yang mengguncang pulau Nias pada tahun 2005 silam dan ditambah lagi masyarakat atau penduduk di sekitar kawasan pesisir kurang peduli akan manfaat bahwa tumbuhan mangrove ini sangat baik dan bermutu tinggi dalam kehidupan masyarakat baik sebagai perlindungan, pengobatan maupun sebagai bahan bangunan. Untuk itu perlunya penelitian “ Struktur Vegetasi Mangrove Di Kawasan Pesisir Desa Sisara Hili Teluk Siabang Kecamatan Sawo Kabupaten Nias Utara Propinsi Sumatera Utara”.

**1.2 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui struktur vegetasi mangrove yang ada di sekitar Kawasan Pesisir Desa Sisara Hili Teluk Siabang Kecamatan Sawo Kabupaten Nias Utara Propinsi Sumatera Utara yang meliputi jenis, kerapatan, frekuensi, dominasi, dan indeks nilai penting mangrove yang ada.

Manfaat yang diharapkan dengan adanya penelitian ini adalah dapat dijadikan sebagai salah satu bahan rujukan dalam mengambil kebijakan pengelolaan kawasan pesisir daerah penelitian.